

PERAN COP26 SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA, DALAM PANDANGAN GREENPEACE

Novika Perbina¹, Billy Jeremie S¹, Rueben FM Pasaribu¹

¹Universitas Kristen Indonesia

Email: novikap21@gmail.com

Abstract

Lately, the issue of climate change is being discussed. Whether it's in social media or mass media. Not without reason, the issue of climate change is discussed, this is because there is not a single human being who is not affected by climate change. Starting from temperature changes, droughts, extreme weather, sea-level rise, and so on. Various ways have been taken to deal with this issue and one of them is the United Nations Conference on climate change (COP26). In this meeting, various agreements have been agreed such as measures to reduce the use of coal-fired electricity and others. This paper will discuss the relevance of COP26 to achieving the objectives of SDGs 13 in Indonesia.

Keywords: SDGS, COP26, Indonesia, Greenpeace.

Abstrak

Belakangan ini, isu perubahan iklim sedang gencar diperbincangkan. Entah itu dalam media sosial maupun media massa. Bukan tanpa alasan isu perubahan iklim ini diperbincangkan, hal ini dikarenakan tidak ada satu manusia yang tidak terkena dampak dari perubahan iklim. Mulai dari perubahan suhu, kekeringan, cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut dan lain sebagainya. Berbagai cara telah dilakukan untuk menangani isu ini dan salah satunya adalah Konferensi PBB yang membahas tentang perubahan iklim (COP26). Dalam pertemuan ini, berbagai kesepakatan telah disepakati seperti langkah untuk mengurangi penggunaan listrik berbahan bakar batu bara dan lainnya. Tulisan ini akan membahas relevansi COP26 untuk tercapainya tujuan SDGS 13 di Indonesia.

Kata Kunci: SDGS, COP26, Indonesia, Greenpeace.

1. PENDAHULUAN

Iklim adalah rata-rata cuaca, cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tersebut. Iklim adalah ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tersebut (temperature, curah hujan atau angin) pada periode waktu tersebut, yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus karena interaksi antara komponen-komponennya dengan faktor eksternal seperti vulkanik erupsi, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. (Ditjen PPI MENLHK n.d.). United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendefinisikan Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan

oleh aktivitas manusia, baik secara perlahan atau cepat, untuk mengurangi lapisan ozon global dan variabilitas iklim. Atmosfer global terdiri dari zat yang disebut Gas Rumah Kaca (GRK), yang terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan unsur lainnya. Gas Rumah Kaca diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Namun, ketika konsentrasi gas rumah kaca meningkat, lapisan atmosfer menjadi lebih tebal. Kuantitas panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi meningkat seiring dengan menebalnya lapisan atmosfer, yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut sebagai pemanasan global. Variabilitas iklim, berbeda dengan perubahan iklim, adalah fluktuasi iklim di semua skala temporal dan geografis dalam periode waktu tertentu (seperti bulan,

musim, atau tahun), dibandingkan dengan data jangka panjang untuk periode kalender yang sama. Divergensi ini, yang biasa disebut sebagai anomali, digunakan untuk mengukur variabilitas iklim. Variabilitas iklim berbeda dari perubahan iklim dalam hal waktu yang diperlukan untuk terjadinya perubahan. (Ditjen PPI MENLHK n.d.)

Kata COP adalah singkatan dari 'Conference of Parties', sedangkan angka 26 mengacu pada sesi ke-26. UNFCCC didirikan pada tahun 1992 ketika 154 negara meratifikasi konvensi perubahan iklim yang baru. Pada tahun 1994, perjanjian tersebut mulai berlaku (Mardatila 2021). Pada tahun 2015, Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP21) diadakan di Paris. Untuk pertama kalinya, masing-masing negara berjanji untuk bekerja sama menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, dengan target 1,5 derajat Celcius, untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan memberikan dana untuk mencapai tujuan ini. Pada COP15, KTT iklim yang diadakan di Kopenhagen pada tahun 2009, negara-negara kaya berjanji untuk menawarkan setidaknya \$100 miliar bantuan keuangan tahunan kepada negara-negara yang paling terkena dampak darurat iklim. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) akan menjadi pertemuan terbesar para pemimpin dunia yang pernah diselenggarakan di wilayah Inggris. Ribuan lainnya diharapkan untuk menghadiri COP, baik di dalam maupun di luar pusat konvensi.

Dalam KTT iklim COP26 Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima kesepakatan akhir untuk menghapus bahasa yang menyerukan agar listrik berbahan bakar batu bara "dihapus" dan digantikan dengan "penurunan bertahap." Produsen batu bara, bahan bakar fosil yang paling mencemari, serta negara-negara yang mengkonsumsi minyak, gas, dan batu bara, mengklaim bahwa perubahan frasa menunjukkan bahwa mereka secara efektif membenarkan penggunaan sumber daya alam dengan permintaan tinggi dan ketersediaan terbatas. Perubahan dalam ungkapan, serta bagian yang meminta penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang "tidak efisien", membuat marah negara-negara progresif dan juru kampanye iklim. Kesepakatan itu umumnya dipuji karena menjaga harapan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, meskipun banyak dari sekitar 200 negara di sana ingin pergi (Shivani Singh and Aaron Sheldrick 2021).

Kesepakatan ini dinilai sangat ambisius (Kate Abnett and Elizabeth Piper 2021).

Sementara proposal tersebut mempertahankan tuntutan intinya agar negara-negara membuat janji iklim yang lebih keras tahun depan, negara-negara yang rentan mengatakan mereka membutuhkan kesepakatan yang lebih ambisius mengenai kompensasi finansial, dengan kontribusi dari negara-negara kaya yang bertanggung jawab atas pemanasan global akan diberikan kepada negara-negara miskin yang menanggung beban terberat. biaya badai yang memburuk, kekeringan, dan naiknya permukaan laut. Rancangan baru ini, yang bertujuan untuk menjamin bahwa dunia menangani pemanasan global cukup cepat untuk mencegahnya menjadi bencana, adalah tindakan penyeimbangan yang rumit, mendamaikan kebutuhan negara-negara yang rentan iklim, pencemar terbesar di dunia, dan negara-negara yang ekonominya bergantung pada fosil. bahan bakar.

Karena pertemuan COP 26 tidak menghasilkan cukup janji pengurangan emisi untuk memenuhi tujuan 1,5°C, rancangan tersebut mendorong pemerintah untuk merevisi target iklim mereka pada tahun 2022. Dinyatakan bahwa peningkatan janji iklim harus mempertimbangkan "keadaan nasional yang berbeda," sebuah ungkapan yang mungkin menyenangkan beberapa negara berkembang, yang berpendapat bahwa tuntutan pada mereka untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi harus kurang ketat daripada yang ada di negara-negara berkembang. Para ahli percaya bahwa emisi karbon dioksida dunia, yang sebagian besar disebabkan oleh pembakaran minyak, gas, dan batu bara, harus dikurangi hingga 50% pada tahun 2050.

Pada akhir September tahun 2015, para pemimpin berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebuah rencana aksi global baru untuk mengurangi kemiskinan (SDGs). SDGS memiliki definisi sebagai serangkaian 17 tujuan dan 169 target yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dunia. SDGs, yang mencakup 15 tahun ke depan, akan menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 (Thomson Reuters Foundation 2015). Salah satu tujuan dalam SDGS adalah *Climate Action*, dimana target besarnya adalah mengambil aksi segera mungkin untuk menangani atau memerangi perubahan iklim dan dampaknya (Sustainable Development Goals 2017). Terdapat relasi antara COP26 dan SDGS

tujuan 13 dan relasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

(Charles Warren 2020) dalam karya tulisnya yang berjudul "*Climate change, COP26 and the crucible of crisis: editorial introduction to the special issue*" berpendapat bahwa: "*COP26 adalah kesempatan yang baik untuk mengambil keputusan terkait isu perubahan iklim. Namun tugas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, para ilmuwan, dan para ahli. Dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat agar kesepakatan dalam COP26 tercapai*". Dari pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa terlepas dari berbagai tanggapan negatif terkait COP26 ini, COP26 menunjukkan kemauan aktor negara untuk segera mengambil keputusan terkait perubahan iklim. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses tercapainya tujuan SDGS atau COP26 akan sulit karena setiap negara memiliki kepentingan masing-masing.

(Naveen Kumar Arora 2021) dalam karya tulisnya yang berjudul "*COP26: more challenges than achievements*". Berpendapat bahwa: "*COP26 memiliki relevansi dengan SDGS yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Kondisi bumi sekarang ini, mendesak kita untuk segera mengambil tindakan yang menyelamatkan kondisi bumi dan hal ini tidak akan tercapai jika negara tidak terlibat dan berkomitmen*". Dari pendapat ini, ditunjukkan bahwa kondisi bumi saat ini mendesak kita bahkan sampai ke tingkat negara untuk segera mengambil keputusan mengenai perubahan iklim. Peran negara sangat penting dalam tercapainya tujuan SDGS maupun COP26 namun, bukan berarti masyarakat tidak berperan penting dan dalam kasus ini diperlukan komitmen setiap aktor, baik itu negara, organisasi internasional, masyarakat, dan lainnya agar SDGS dan COP26 bisa tercapai.

(Saheb 2021) dalam karya tulisnya yang berjudul "*COP26: Sufficiency Should be First*". Berpendapat bahwa: "*Menangani keadaan darurat iklim membutuhkan melampaui serangkaian langkah-langkah kebijakan saat ini. Sebaliknya, konsep kecukupan perlu diadaptasi dan diterapkan pada tantangan lingkungan dan sosial saat ini. Ini akan memberikan metrik yang jelas yang adil dan dalam batas ekologis Bumi. Penerapan kebijakan kecukupan bahan bangunan akan memberikan standar hidup yang layak bagi semua dan memiliki dampak signifikan dalam membatasi pemanasan global*".

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan sekali lagi negara memiliki peran yang penting. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk membuat sebuah kebijakan maka kita berbicara pada level negara. Dan jika negara tidak serius dan berkomitmen dalam hal pengangan perubahan iklim maka tercapainya tujuan SDGS dan COP26 akan sulit untuk dicapai, karena tidak

ada regulasi atau kebijakan yang mendukung hal ini.

Dari beberapa pendapat dalam penelitian terdahulu, peneliti akan membahas Peran COP26 Sebagai Pendukung Pencapaian Tujuan 13 Sdgs di Indonesia dan apakah Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran dalam isu perubahan iklim? Karena berdasarkan pendapat para peneliti terdahulu, dapat disimpulkan bahwa negara harus berkomitmen agar tujuan SDGS atau COP26 bisa tercapai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami bertujuan menemukan representasi COP 26 dalam mendukung pencapaian Tujuan 13 SDGs di Indonesia dalam kacamata Greenpeace. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui metode studi pustaka dengan sumber sekunder yaitu, jurnal, literatur dan website valid. dalam pengumpulan data sekunder, kami menggunakan metode kualitatif dengan mengevaluasi data yang sesuai dengan tujuan pada penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan yang Dilakukan Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim Melalui Cop26

Pada setiap gambar harus diberikan keterangan di bawah gambar. Keterangan pada tabel diberikan di atas tabel. Keterangan dituliskan dengan huruf kecil kecuali pada karakter pertama pada tiap kalimat. Seluruh gambar harus diberi penomoran secara berurutan. Gambar diletakkan di tengah halaman (*center alignment*), sedangkan tabel diawali di pinggir kiri (*left alignment*) halaman.

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kemakmuran dan pem-bangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci. Perubahan iklim adalah masalah global yang tidak terkecuali pemerintah di negara maju dan berkembang Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 31 Oktober s.d. 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, departemen Keuangan bersama para pemangku ke-pentingan lainnya mengikuti pertemuan penting terkait upaya global mitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim yaitu Conference of the Parties ke-26 (COP26) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). COP26 merupakan sebuah pertemuan sangat penting karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dilakukan sejak Paris Agreement diadopsi pada tahun 2016 dimana 191 negara harus menetapkan target yang lebih ambisius lagi terkait kontribusi-nya

untuk aksi perubahan iklim di bawah Persetujuan Paris. COP26 merupakan harapan besar bagi banyak pihak, termasuk Menteri keuangan, Lembaga keuangan multilateral, dalam mencapai komitmen terkait pengurangan emisi.

Perundingan COP tidak terlepas dari sejarah di mana Indonesia pernah menjadi Presidensi COP13 di Bali pada tahun 2007 yang menghasilkan dokumen mendasar yaitu Bali Roadmap serta rangkaian pertemuan selanjutnya kemudian mengantarkan pada COP21 di Paris pada 2015 yang menghasilkan Paris Agreement sebagai basis implementasi global pasca 2020. Perjanjian Paris bersifat mengikat dan tidak hanya berlaku pada negara maju saja, tetapi untuk semua negara (*legally binding and applicable to all Parties*), dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi dengan perbedaan dan kemampuan yang sesuai (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*).

Kesepakatan dan komitmen dari setiap pihak untuk mencapai target iklim yang lebih ambisius, tentunya akan mempengaruhi kebijakan dan strategi Indonesia. Indonesia telah menandatangani sejumlah kesepakatan terkait pengurangan deforestasi, transisi energi dan produksi elektronik hemat energi. Saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim. Dalam 20 tahun terakhir kebakaran hutan turun 82%. Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia juga telah memulai restorasi mangrove dengan luas 600.000 hektar hingga 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019. Di sektor energi, Indonesia juga membuat kemajuan dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menggunakan energi baru terbarukan termasuk biofuel serta mengembangkan industri berbasis energi bersih termasuk membangun kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Meskipun sudah banyak yang Indonesia lakukan, dengan lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan serta negara memiliki laut luas yang berpotensi menyumbang karbon, tetap membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju. Presiden Indonesia Joko Widodo tetap akan memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi *net-zero emission* dunia. Namun

kembali lagi, berhubung Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dan sesuai dengan kesepakatan pada COP26 bahwa negara kaya akan berkontribusi untuk menyumbang dana \$100 miliar per tahun khususnya dalam pendanaan iklim, presiden Joko Widodo kembali mem-pertanyakan seberapa besar kontribusi negara-negara maju untuk negara berkembang seperti Indonesia? Jika kesepakatan akhir dalam merubah iklim menjadi lebih maju dengan transfer energy, teknologi apa yang dapat diberikan? serta program seperti apa yang dapat berjalan untuk mencapai target SDGs berhubung dengan keterhambatan akibat pandemic covid-19?

Presidensi COP26 Inggris juga memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai pada pertemuan COP26, antara lain (i) mempercepat tindakan dan upaya menuju Net Zero Emission (NZE) salah satunya adalah menjaga tingkat suhu global yang ideal tidak lebih dari 1,5°C; (ii) memastikan bahwa warga dunia dan habitat alami dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim; (iii) memobilisasi keuangan terutama dengan meminta pertanggungjawaban negara-negara maju untuk memenuhi komitmen mereka agar mengumpulkan \$100miliar per tahun pada tahun 2020, dan (iv) mendorong negara-negara, bisnis, masyarakat sipil dan warga negara bersama-sama untuk mencapai Paris Agreement.

Komitmen Indonesia untuk pe-nanggulangan iklim tertuang dalam beberapa dokumen, di antaranya NDC yang mencakup target penurunan iklim sampai dengan 2030, *Low Carbon Development Initiative* (LDCI) 2019 yang berisikan strategi pembangunan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon sampai dengan 2050 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memprioritaskan kualitas lingkungan penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Dokumen terakhir yang diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNFCCC pada pertengahan tahun 2021 adalah *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) Indonesia yang menetapkan target dan rencana penanggulangan perubahan iklim hingga tahun 2050. Di dalamnya, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa fungsi penyerapan karbon (carbon sink) dari sektor kehutanan dari tahun 2030 kemungkinan akan mencapai NZE pada 2060 atau lebih awal.

4.2. Hubungan Antara Cop26 Serta Pencapaian Tujuan 13 Sdgs

Tujuan 13 SDGs yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Relevansi tujuan ke-13 ini dengan COP26 adalah kesepakatan dalam menjaga suhu

tetap dibawah 1,5-2°C, yang mana kesepakatan ini juga ada dalam point-point dalam tujuan SDGs ke-13. Ada Pula dalam target 13A yaitu mengkarbonasi sistem energi, memastikan energi bersih untuk semua dan peningkatan efisiensi energi dengan target 2020, 2030 dan 2050. Untuk mengendalikan pemanasan global, negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi pada 2050, yang mencakup semua sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) termasuk energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Strategi ini harus transparan dan rinci tentang bagaimana negara-negara ingin mencapai pengurangan emisi (termasuk emisi yang terkait dengan energi), bagaimana mengurangi konsumsi energi, batubara di sektor listrik, dan memasok listrik untuk tujuan energi (terutama di sektor transportasi dan konstruksi)

Paradigma pembangunan SDGs harus mengadopsi parameter atau variabel perubahan iklim. Memang pada dasarnya paradigma SDGs sudah memasukkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi serta mata rantai atau irisan dari tiga aspek tersebut (ekonomi, sosial, dan ekologi/lingkungan fisik). Perubahan iklim memang merupakan proses fisik, tetapi juga harus dipahami pada tataran sosial ekonomi. Perubahan iklim yang tiba-tiba dapat berdampak negatif pada hasil dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Untuk menyusun rencana pembangunan SDGs, diperlukan informasi berupa proyeksi, skenario, dan simulasi dari variabel dan indikator perubahan iklim. Paradigma pem-bangunan SDGs juga bertujuan melindungi komunitas atau masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim yang berisiko tinggi dan sangat rentan. Laporan Terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan dan mencatat bahwa kelompok termiskin adalah yang kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tanpa pembangunan inklusif dan integrasi cepat aksi perubahan iklim, diperkirakan lebih dari 100 juta orang akan berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2030. Demikian pula, analisis UNDP menunjukkan tidak adanya aksi perubahan iklim akan mengurangi pendapatan dan mengurangi peluang bagi masyarakat rentan.

Pada COP26 juga membahas tentang intensitas CO2 dari sektor listrik dan kapasitas pembangkit listrik baru. Pembangkit tenaga listrik juga bertanggung jawab terhadap sebagian besar total emisi GRK. Untuk mencapai tingkat pe-ngurangan emisi yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 2°C atau kurang, sektor listrik harus mendekati

nol-karbon. Pada umumnya pembangkit listrik di bumi masih banyak menggunakan bahan bakar fosil. Pendeteksian intensitas CO2 dari sektor ketenagalistrikan penting dilakukan untuk mengetahui kontribusinya terhadap penurunan emisi GRK secara umum. Memahami apa yang mendorong per-kembangan intensitas CO2 di sektor ketenagalistrikan juga penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi emisi CO2 dari sektor tersebut. Selain intensitas CO2 dari total stok, perlu dilakukan pengukuran intensitas CO2 dari kapasitas pembangkit listrik baru, dengan teknologi dan memperhitungkan kon-tribusinya terhadap beban dasar dan produksi listrik.

Selain intensitas CO2 dari sektor listrik, pada target SDGs ke 13 bagian C juga membahas tentang pendanaan iklim dari negara-negara maju yang menjadi bantuan dana dalam menangani krisis iklim. Sesuai dengan kesepakatan dalam COP26 juga mengajukan kesepakatan untuk pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang dari negara-negara kaya. Pada target SDGs negara-negara maju telah menjanjikan UNFCCC untuk memberikan sekitar \$100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim, hal ini berkaitan langsung dengan kesepakatan COP26.

4.3. Pandangan Greenpeace Terhadap Tujuan Cop26 Dalam Perubahan Iklim

Mengingat besarnya tantangan yang kita hadapi, berikut adalah tindakan iklim yang Greenpeace Internasional meminta pemerintah ambil bagian dan mendorong dengan segala cara di COP26. Empat harapan ini dapat memastikan masa depan yang lebih adil, lebih aman, dan lebih berkelanjutan untuk semua orang:

4.3.1. Hentikan Semua Proyek Bahan Bakar Fosil Baru Segera Dan Hentikan Industri

COP26 adalah tempat di mana dunia akhirnya harus menyatakan berakhirnya era bahan bakar fosil. Dari pertemuan ini, kita perlu berkomitmen bahwa kita tidak akan berinvestasi dalam bahan bakar fosil baru di mana pun, dan pembongkaran infrastruktur bahan bakar fosil yang ada harus konsisten dengan tujuan 1,5C. Artinya, tidak ada sumur minyak baru, tidak ada pembangkit batu bara baru, tidak ada tambang batu bara baru, dan tidak ada proyek gas baru.

Untuk mempertahankan tingkat peringatan di bawah 1,5C, target pengurangan emisi harus ditingkatkan. Artinya tidak hanya berarti tidak boleh ada proyek baru, tetapi juga tidak ada

pendanaan baru, dan tidak ada dukungan publik untuk proyek yang sudah ada juga harus dihentikan. Prioritas juga harus diberikan untuk menghapus batubara sesegera mungkin dan teks akhir dari keputusan COP26 harus secara khusus membahas bahan bakar fosil sebagai penyebab utama darurat iklim.

Penghapusan bahan bakar fosil juga harus mencakup transisi yang adil bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak. Solusi cerdas, efisien, dan berkelanjutan siap memenuhi semua kebutuhan energi kita, bila memungkinkan.

4.3.2. Tetapkan rencana pengurangan emisi yang ambisius untuk mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030

Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), sekelompok ilmuwan iklim top dunia yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan tidak lebih dari 500 miliar ton CO₂ (dihitung dari awal 2020) untuk memberi diri kita peluang 50% untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Untuk meningkatkan peluang kita menghindari skenario iklim terburuk sebesar 67%, kita harus membatasi diri hingga 400 miliar ton. Sayangnya, saat ini, aktivitas manusia menghasilkan lebih dari 40 miliar ton per tahun sehingga diperlukan tindakan yang drastis dan mendesak agar tidak melebihi batas tersebut.

Kita harus mempertimbangkan tindakan yang akan mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030 dan menempatkan kita pada jalur menuju emisi Nol Bersih pada tahun 2050. Jika pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan komitmen pengurangan emisi yang mereka ajukan ke PBB, mereka akan menutup pintu pada tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Hasil saat ini menunjukkan bahwa emisi akan meningkat sebesar 16% pada tahun 2030, menempatkan kita di jalur pemanasan 2,7°C pada akhir abad ini. Sementara itu, kebijakan pemerintah global saat ini akan menempatkan kita lebih rendah lagi hingga 2,9°C.

Negara-negara G20 menyumbang hampir 80% dari emisi global, tetapi terlalu banyak dari mereka yang gagal meningkatkan perencanaan iklim sebelum COP26, termasuk India, China, Australia, Arab Saudi, Rusia, dan Brasil. Itu sebabnya, di Glasgow, kita membutuhkan negara-negara terkaya untuk menunjukkan kepemimpinan dan bergerak lebih cepat secara signifikan.

4.3.3. Aturan kuat yang mendorong kerja sama internasional yang adil daripada rencana untuk membuka

pasar global dalam penyeimbangan karbon atau Carbon Offset (itu penipuan dan tidak berhasil)

Penyeimbangan tidak menghentikan emisi yang memasuki atmosfer dan menghangatkan dunia kita itu hanya mencegah emisi muncul di buku besar pencemar. Pada dasarnya, ini adalah trik akuntansi. Menurut para ilmuwan di balik laporan ilmiah terbaru PBB, dunia perlu untuk melakukan pengurangan emisi yang segera, drastis dan konsisten tetapi ke-seimbangannya justru sebaliknya. Ini hanyalah izin untuk terus mencemari, itu mendorong komoditisasi alam dan memungkinkan perusahaan dan pemerintah yang kuat untuk merebut tanah masyarakat yang rentan dan terinjak-injak pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar integritas lingkungan.

Sejujurnya: Carbon Offset adalah penipuan yang berbahaya, tidak berhasil dan memperluasnya hanya akan menunda tindakan nyata.

4.3.4. Komitmen finansial untuk negara-negara rentan iklim yang terkena dampak iklim

Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Menurut catatan, penghasil emisi terbesar adalah Amerika Serikat, China, dan Rusia – termasuk Jepang, Jerman, dan Inggris Raya yang berada di 10 besar. AS, UE, Inggris, Jepang, Kanada, dan Australia juga berada di antara negara dan blok terkemuka yang telah berkomitmen untuk menyediakan \$100 miliar dalam pendanaan iklim setiap tahun pada tahun 2020 tetapi mereka gagal mewujudkannya. Ada defisit \$20 miliar dan negara-negara perlu melangkah dan mengambil tanggung jawab mereka.

Negara-negara yang berkomitmen harus menyajikan rencana yang kuat, transparan, berdasarkan kebutuhan untuk COP26 yang menunjukkan bagaimana \$100 miliar per tahun akan dicapai selama lima tahun ke depan. Dana tersebut akan membantu mengembangkan sistem energi bersih yang menghindari penggunaan bahan bakar fosil dan beradaptasi dengan pemanasan global di masa depan. Selain itu, lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk terus beradaptasi dan mengatasi serta mengkompensasi kerusakan yang sudah disebabkan oleh dampak iklim di negara-negara yang rentan.

Greenpeace mengirim perwakilan untuk turut menghadiri COP. Penting jika para ahli dan pelopor berpartisipasi dalam negosiasi; sebagai pengawas, kontributor, dan pastikan politisi benar-benar mendengarkan. Greenpeace mendukung kelompok-kelompok akar rumput dan perwakilan lainnya seperti pemimpin adat yang menghadiri COP. Banyak komunitas dari Global South yang terkena dampak langsung

perubahan iklim, meskipun bukan mereka yang paling bertanggung jawab. Keputusan yang diambil oleh COP26 tentunya akan berdampak langsung bagi mereka. Sebagai organisasi global, Greenpeace juga bergerak dan bekerjasama dengan para aktivis di berbagai belahan dunia untuk menekan pihak berwenang agar menghasilkan hasil terbaik dalam negosiasi COP26 ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Perubahan iklim adalah masalah global yang tidak terkecuali pemerintah di negara maju dan berkembang. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang serius untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 31 Oktober s.d. 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, departemen Keuangan bersama para pemangku kepentingan lainnya mengikuti pertemuan penting terkait upaya global mitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim yaitu Conference of the Parties ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change.

COP26 merupakan sebuah pertemuan sangat penting karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dilakukan sejak Paris Agreement diadopsi pada tahun 2016 dimana 191 negara harus menetapkan target yang lebih ambisius lagi terkait kontribusinya untuk aksi perubahan iklim di bawah Persetujuan Paris. Perundingan COP tidak terlepas dari se-jarah di mana Indonesia pernah menjadi Presidensi COP13 di Bali pada tahun 2007 yang menghasilkan dokumen mendasar yaitu Bali Roadmap serta rangkaian pertemuan selanjutnya kemudian mengantarkan pada COP21 di Paris pada 2015 yang menghasilkan Paris Agreement sebagai basis implementasi global pasca 2020. Perjanjian Paris bersifat mengikat dan tidak hanya berlaku pada negara maju saja, tetapi untuk semua negara, dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi dengan perbedaan dan kemampuan yang sesuai. Kesepakatan dan komitmen dari setiap pihak untuk mencapai target iklim yang lebih ambisius, tentunya akan mempengaruhi kebijakan dan strategi Indonesia.

Saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim. Meskipun sudah banyak yang Indonesia lakukan, dengan lahan luas yang

hijau dan potensi dihijaukan serta negara memiliki laut luas yang berpotensi menyumbang karbon, tetap membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju. Presiden Indonesia Joko Widodo tetap akan memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Komitmen Indonesia untuk penanggulangan iklim tertuang dalam beberapa dokumen, di antaranya NDC yang mencakup target penurunan iklim sampai dengan 2030, Low Carbon Development Initiative 2019 yang berisikan strategi pembangunan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon sampai dengan 2050 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang memprioritaskan kualitas lingkungan penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Dokumen terakhir yang diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNFCCC pada pertengahan tahun 2021 adalah Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience Indonesia yang menetapkan target dan rencana penanggulangan perubahan iklim hingga tahun 2050. Di dalamnya, pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa fungsi penyerapan karbon dari sektor kehutanan dari tahun 2030 kemungkinan akan mencapai NZE pada 2060 atau lebih awal.

Relevansi tujuan ke-13 ini dengan COP26 adalah kesepakatan dalam menjaga suhu tetap dibawah 1,5-2°C, yang mana kesepakatan ini juga ada dalam point-point dalam tujuan SDGs ke-13. Untuk mengendalikan pemanasan global, negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi pada 2050, yang mencakup semua sumber emisi Gas Rumah Kaca termasuk energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Perubahan iklim yang tiba-tiba dapat berdampak negatif pada hasil dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Paradigma pembangunan SDGs juga bertujuan melindungi komunitas atau masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim yang berisiko tinggi dan sangat rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Charles Warren, Dan Clayton, "Climate change, COP26 and the crucible of crisis: editorial introduction to the special issue." SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL 1-4, 2020.

- [2] Ditjen PPI MENLHK. n.d. ditjen ppi.menlhk.go.id. Accessed January 12, 2022.
- [3] Kate Abnett and Elizabeth Piper, Simon Jessop. Reuters. November 12. Accessed January 12, 2022, 2021
- [4] Mardatila, Ani. 2021. Merdeka.com. November 4. Accessed January 12, 2022.
- [5] Naveen Kumar Arora, Isha Mishra, "COP26: more challenges than achievements." Springer Link 585-588, 2021
- [6] Saheb, Yamina, "COP26: Sufficiency Should be First." Buildings & Cities, 2021
- [7] Shivani Singh and Aaron Sheldrick, Noah Browning. 2021. Reuters. November 15. Accessed January 12, 2022
- [8] Sustainable Development Goals, "tujuan tigabelas", 2017
- [9] Thomson Reuters Foundation. 2015. Reuters. September 7. Accessed January 12, 2022.
- [10] Britannica, The Editors of Encyclopaedia."Greenpeace". Encyclopaedia Britannica, 24 Mar, 2020
- [11] Vincent, Andrew, "Green political theory", 2018
- [12] Flores, G, 4 "Tuntutan yang Kita Miliki untuk COP26: Waktunya Sekarang". Greenpeace, 2021
- [13] Greenpeace Indonesia, "Semua Tentang Konferensi Iklim COP26 yang Perlu Kita Tahu". Greenpeace, 2021
- [14] Greenpeace Indonesia, "Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow". Greenpeace, 2021
- [15] Halimatussadiyah, A, "Hasil dan Implikasi COP-26 pada Penanggulangan Perubahan Iklim di RI". p. 6, 2021
- [16] KOMINFO. "Presiden sampaikan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di COP26", 2021
- [17] Larasati, E, "Publikasi siaran pers", Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2021
- [18] Susanti, I, "Implementasi SDGs Dalam Penanganan Isu Perubahan Iklim", 2017